

**URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN
KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Magister Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Hendrik Kurniawan
NIM. 02040422030

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrik Kurniawan
NIM : 02040422030
Program : Magister (S-2)
Prodi : Hukum Tata Negara
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2023

Saya yang menyatakan,



Hendrik Kurniawan

NIM. 02040422030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia Perspektif Demokrasi Konstitusional" yang ditulis oleh Hendrik Kurniawan ini telah disetujui pada tanggal 15 November 2023.

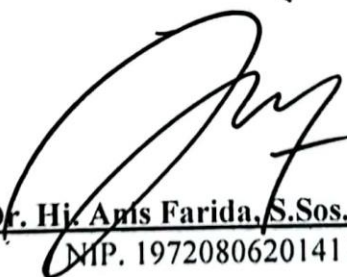
Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum
NIP. 196602122007011049

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia Perspektif Demokrasi Konstitusional” yang ditulis oleh Hendrik Kurniawan ini telah diuji pada tanggal 30 November 2023

Tim Penguji:

1. Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum. :
2. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si. :
3. Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag. :
4. Dr. Achmad Fageh, M.H.I. :



Surabaya, 5 Desember 2023
Direktur,



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 197103021996003102



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hendrik Kurniawan
NIM : 02040422030
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : filehendrik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia Perspektif Demokrasi Konstitusional

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 November 2023

(Hendrik Kurniawan)



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hendrik Kurniawan
NIM : 02040422030
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : filehendrik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia Perspektif Demokrasi Konstitusional

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 November 2023

(Hendrik Kurniawan)

ABSTRAK

Partai politik merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi untuk menyambungkan aspirasi dari masyarakat luas maupun kelompok kepada penguasa atau pemerintah. Demi mewujudkan negara yang demokratis di Indonesia harus dimulai dari internal partai politik itu sendiri. Namun yang menjadi permasalahan adalah manakala tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di dalam undang-undang partai politik dampaknya akan sangat luas. Dampak dari tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah menghambat regenerasi kepemimpinan partai politik, terjadinya dinasti politik keluarga diinternal partai politik, timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan sikap kesewenang-wenangan oleh ketua umum partai politik. Dampak yang muncul sebagaimana yang telah penulis paparkan maka perlunya suatu pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, bahwa adanya urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama satu periode, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, sebab partai politik termasuk jabatan publik yang memegang peranan yang sangat sentral dalam berdemokrasi. *Kedua*, perlunya mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan cara melakukan *judicial review* ke MK apabila ada hak konstitusional yang diciderai atas berlakunya undang-undang tersebut, yang mengakibatkan anggota partai politik tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi ketua umum partai politik (ada hak konstitusional yang terdiciderai). Cara yang kedua yakni dilakukan revisi undang-undang melalui prosedur perubahan dilembaga DPR dan melalui prosedur perubahan sebagaimana yang tertuang di UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merubah Pasal 23 ayat (1) tentang pergantian ketua umum partai politik.

Kata Kunci: Pembatasan; Jabatan Ketua Parpol; Demokrasi Konstitusional

ABSTRACT

Political parties are an important instrument in a democratic country to connect the aspirations of the wider community and groups to the authorities or government. In order to create a democratic state in Indonesia, it must start from within the political parties themselves. However, the problem is that if there is no limitation on the term of office of the general chairman of a political party in the political party law, the impact will be very broad. The impact of not limiting the term of office of the general chairman of a political party is that it hampers the regeneration of political party leadership, the occurrence of family political dynasties within political parties, the emergence of abuse of power and arbitrary attitudes by the general chairman of a political party. The impact that arises as the author has explained is the need for a limitation on the term of office of the general chairman of a political party.

This research is a type of normative legal research and uses two approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this research are as follows: first, that there is an urgency to limit the term of office of general chairmen of political parties in Indonesia based on the principles of constitutional democracy to limit the term of office of general chairmen of parties to 5 (five) years and they can be re-elected with the same position once. periods, whether consecutive or non-consecutive, because political parties are public offices that play a very central role in democracy. Second, there is a need to regulate limitations on the term of office of general chairs of political parties in Indonesia through Law no. 2 of 2011 concerning Amendments to Law no. 2 of 2008 concerning Political Parties by conducting a judicial review to the Constitutional Court if there are constitutional rights that are violated due to the enactment of this law, which results in political party members not being able to nominate themselves to become general chairman of the political party (there are constitutional rights that are violated). The second way is to revise the law through the amendment procedure at the DPR institution and through the amendment procedure as stated in Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations to amend Article 23 paragraph (1) concerning the change of general chairman of political parties.

Keywords: *Restrictions; Position of Chair of Political Parties; Constitutional Democracy*

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Sampul Dalam	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Pengesahan Tim Penguji Ujian Tesis	v
Persetujuan Publikasi	vi
Motto	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Pedoman Transliterasi	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kerangka Teoritik	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II

Teori Demokrasi Konstitusional, Teori Kekuasaan, Teori Sistem Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan

A. Demokrasi Konstitusional	24
1. Pengertian Demokrasi Konstitusional	24
2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	25
3. Masa Demokrasi Konstitusional di Indonesia Tahun 1945-1959	26
B. Teori Kekuasaan	27
1. Pengertian Kekuasaan	27
2. Pengertian Kekuasaan Menurut Para Ahli	27
3. Legitimasi Kekuasaan	29
4. Sifat Kekuasaan	30
a) Position Power	30
b) Personal Power	30
c) Sumber Kekuasaan	31
5. Cara Mempertahankan Kekuasaan	32
6. Menghilangkan Peraturan-Peraturan yang Dapat Merugikan Kekuasaan	32
C. Sistem Hukum	33
D. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	34
1. Pengertian Peraturan	34
2. Istilah Dalam Ilmu Perundang-Undangan	36
3. Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional	40

BAB III

Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Di Indonesia	43
A. Sejarah Partai Politik	43
B. Sejarah Partai Politik di Indonesia	43
a) Sejarah Partai Politik Sebelum Kemerdekaan	44
b) Sejarah Partai Politik Pada Masa Orde Lama	47
c) Sejarah Partai Politik Pada Masa Orde Baru	48
d) Sejarah Partai Politik Pada Masa Reformasi	53
C. Dinamika Partai Politik Menjelang Pemilu 2024	59
D. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik	63

BAB IV

Upaya Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

A. <i>Judicial Review</i> ke Mahkamah Konstitusi (MK)	72
B. Perubahan Undang-Undang Partai Politik	75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari, Feri, dan Charles Simabura, dkk. *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokrasi Internal Partai Politik*. Malang: Intras Publishing, 2020.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Heywood, Andre. *Politics*. New York: Palgraave Foundation, Second Edition, 2002.
- Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta Barat: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Sihombing Eka N.A.M, Hadita Cynthia. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Heywood, Andre. *Politics, Palgrave Foundation, Second Edittion*. New York, 2002.
- Koesoemaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- S.Kay, Richard. *American Constitutionalism, dalam Larry Alexander (ed), Constitutionism, Philosophical Foundation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Satriawan, Moh. Iwan dkk. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Isra, Saldi. *Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum*. Jakarta: Kon Press, 2012.
- Kay, Richard S. *American Constitutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Harjanto, Nico. *Demokrasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Satriawan, M Iwan. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Huda, Ni'matul. Nazriyah. *Teori dan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, Cet. I, 2015, 2015.
- Amiruddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hadjon, M. Philipus. *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Acton, Lord. *Letter to Bishop Mandell*, Creighton: 1887.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Echols, M. Jhon, Shadily Hassan. *Kamus Inggris*, Cet. XV. (Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Al Atok, Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setra Press Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Appadorai, A. *The Substance of Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Musa, Ali Masykur. *Sistem Pemilu: Proposional Terbuka Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) Kerjasama Parliamentary Support and Public Participation, 2003.

Khaled, Badriyah. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Budiatri, Aisyah Putri, *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Gelfeld, B. Preventing Deviations From Presidential Term Limits in Low-and Middleincome Democracies, Disertasi- Pardee Rand Graduate School, 2018.

Jurnal/Artikel/Makalah

Harahap, Insan Harapan. “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.” *Jurnal Bakrie*, (Desember, 2017), 1-9.

Mahardika, Ahmad Gelora. “Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis,” *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2019), 122-132.

Kurniawan, Gede Hartadi. “Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila” *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 17, No. 3 (Oktober, 2020), 264-270.

Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas di Banda Aceh, Focus Group Discussion (FGD). 27 April 2016.

Areza, Tri Sandi Muji. Akbar, Faisal. Nasution, Mirza. “Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 2 (Maret, 2023), 1276-1286.

Ahmad dan Novendri M Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the

- Guardian of Constitution”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4 (Desember 2019), 787-799.
- Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2019), 596-605.
- Dewansyah dan Zulfikar, “Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi” *Jurnal Padjajaran Journal of law*, Vol. 3 No. 2 (Maret, 2016), 285-309

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Anggaran Dasar (AD) Partai PKS Tahun 2013

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar Tahun 2016

Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN Tahun 2010

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem Tahun 2011

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PKB Tahun 2014

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PPP Tahun 2014

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2015

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PDIP Tahun 2015

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura Tahun 2015

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PKPI Tahun 2015

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PBB Tahun 2010

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra Tahun 2012

Internet

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Partai Politik Peserta Pemilu 2019*.

Diakses pada tanggal 11 November 2023. <https://setkab.go.id/inilah-partai-politik-peserta-pemilu-2019-beserta-nomor-urutnya/>

Maulana, Gibran. *Bambang Pacul Jelaskan Kontroversi 'RUU Perampasan Aset Harus Lobi Ketum'*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6666751/bambang-pacul-jelaskan-kontroversi-ruu-perampasan-aset-harus-lobi-ketum>

Rozali, Rais. *Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan*.

Diakses pada tanggal 2 November 2023.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en#:~:text=Pasal%205%20

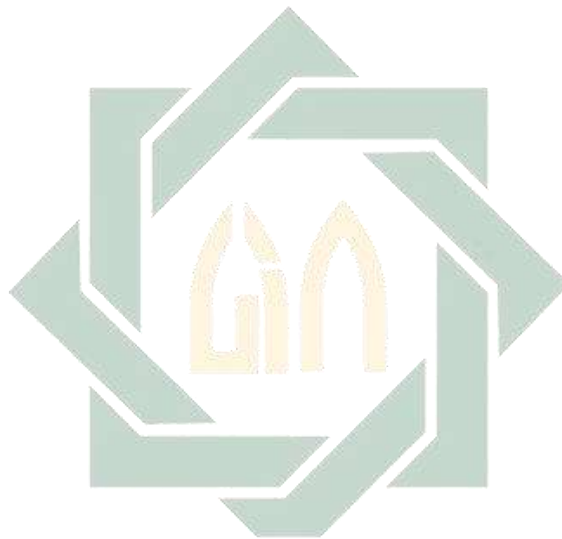
[menentukan%20bahwa%20asas,%20%20kejelasan%20rumusan%20%20dan%20keterbukaan.](#)

Anam, Khoiril. *Peta Koalisi Capres 2024 terbaru: Anis Vs Prabowo Vs Ganjar*. CNBC Indonesia. Diakses pada tanggal 1 November 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230923171523-4-474957/peta-koalisi-capres-2024-terbaru-anies-vs-prabowo-vs-ganjar>

Isra, Saldi. *Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan*. Diakses pada tanggal 1 November 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19330>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A